



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APKB)
KOTA BATAM TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020 selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Batam sebagai bukti akuntabilitas vertikal. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotasebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, dan kami sangat menghargai segala kritik dan saran yang konstruktif demi untuk perbaikan LKjIP ini. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Batam, Januari 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Batam
Kepala,



Umiyati, SE

NIP. 19621027 198503 2 006

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Data Umum Organisasi	3
	D. Sistematika Penyajian	10
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
	A. Rencana Strategis	11
	B. Tujuan dan Sasaran	12
	C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	14
	D. Rencana Kinerja	15
BAB III	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18
	A. Capaian Kinerja	18
	B. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV	PENUTUP	32
LAMPIRAN		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (*performance result*) selama tahun anggaran 2020..

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2020 ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar **Rp 6.124.184.570.00,-** dengan dana yang terserap sebesar **Rp 4.163.504.299.00,-** sampai dengan bulan Desember.

Hasil capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam telah mencapai beberapa sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020. Untuk target indikator kinerja IPG dan IDG masing-masing 94,53% dan 59.50% dengan capaian IPG 94,42%, dan IDG 58.04%. Untuk target indikator kinerja Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan 100%, dengan capaian 100%. Untuk target indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) 73,50%, capaian target 84,02%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kota Batam, berlangsung dengan mengacu pada perencanaan (jangka menengah) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam dan selanjutnya dijabarkan dalam Renstra setiap unit organisasi. RPJMD dan Renstra unit organisasi memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu menengah (lima tahunan).

Sebagai salah satu bentuk perwujudan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, serta sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Gubernur dan Bupati/Walikota wajib untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

DP3APPKB Kota Batam menyusun LKJIP 2020 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2020 yang telah selesai dilaksanakan. Penyusunan didasarkan pada pencapaian sasaran dan kinerja setiap kegiatan yang berlangsung selama Tahun 2020, dan selanjutnya laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan kegiatan tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKJIP ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 jo. Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dengan dasar pembentukan SOTK ini adalah;

- PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada BAB V Tentang Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah, dan pada Bagian tiga tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan (pada pasal 22).
- Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Batam No. 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara sinergi berkesinambungan.

Sesuai Peraturan Walikota tersebut kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam No. 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, selain tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
2. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum; dan
3. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

1. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan Dan Budaya;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak Dibidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan.

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, membawahi :

1. Seksi Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Anak; dan
3. Seksi Data Informasi Perempuan Dan Anak.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :

1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; dan
3. Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi.

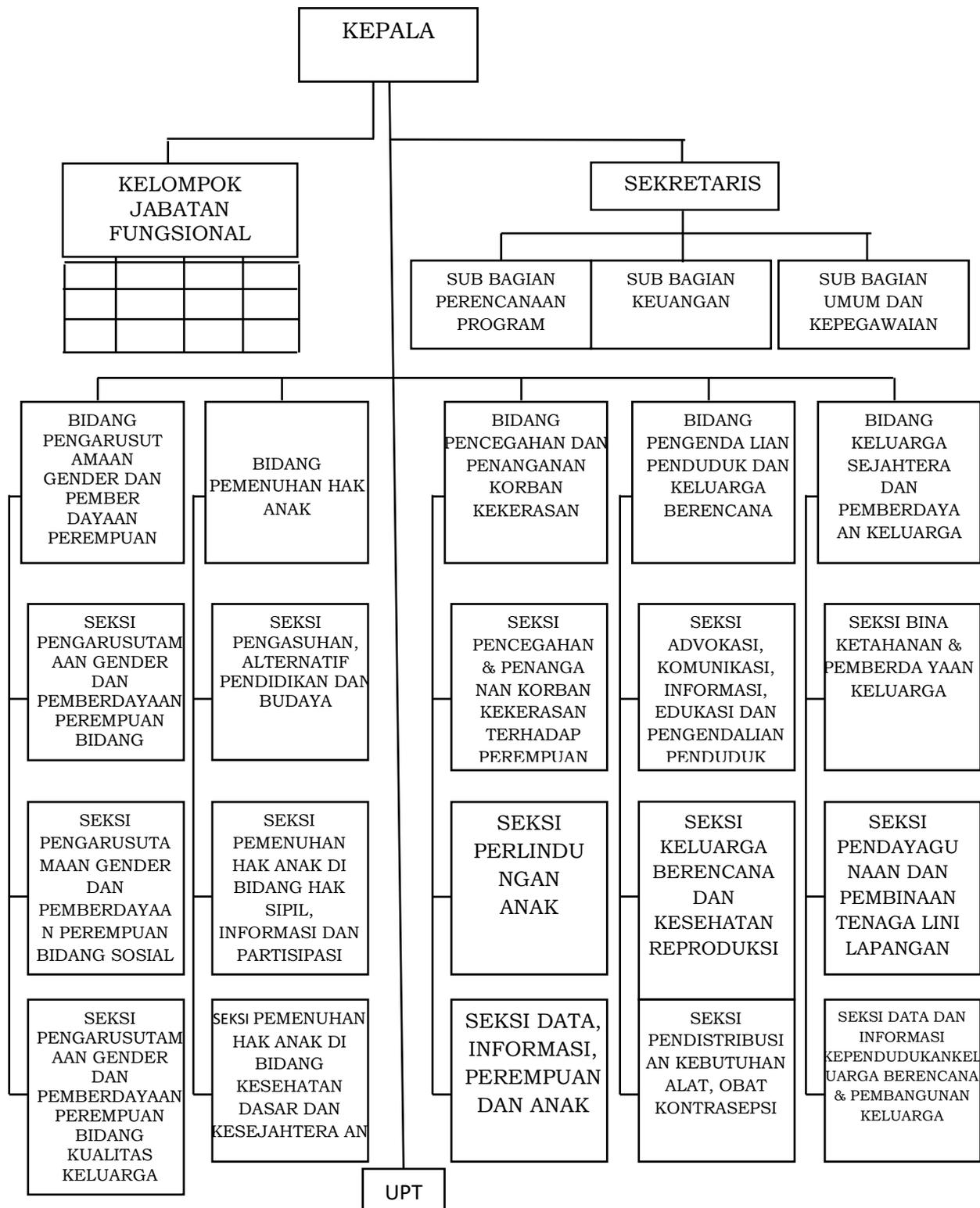
g. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :

1. Seksi Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Seksi Pendayagunaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
3. Seksi Data Dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga;

h. UPT; dan

i. Kelompok Jabatan fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM**



3. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai upaya dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara terus menerus dan berkesinambungan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis didalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kota Batam, yang didalam pelaksanaan otonomi daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek strategis organisasi antara lain berkenaan dengan tugas dan fungsi organisasi sehingga dipandang perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan berwawasan nasional secara optimal dan memadai,
- 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- 3) Pemerataan dan peningkatan Pelayanan dibidang Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi baik berupa pengadaan Alat Kontrasepsi maupun penyediaan petugas layanan.
- 4) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian Keluarga Sejahtera melalui pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, maka kedudukan dan peran perempuan perlu mendapat perhatian khusus serta perlu ditingkatkan secara terus menerus, sehingga kedepan terutama untuk tingkat Kabupaten/Kota perempuan menjadi salah satu unsur terpenting dalam keluarga Yang memegang kunci utama keberhasilan pembangunan pada umumnya.

Kemudian yang berikutnya adalah masih adanya kaum perempuan yang latar belakang pendidikannya belum memadai sehingga sangat diperlukan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan penyadaran gender dimasyarakat tentunya melalui program yang berorientasi pada peran, aspirasi, keutuhan dan permasalahan perempuan secara komprehensif.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam didukung oleh personel/ SDM sebanyak 48 orang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	20	3	23
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Staf	-	3	7	-	10
4.	Arsiparis	-	-	-	-	-
5.	THD	-	-	-	-	
6.	THL	-	-	-	-	13
Jumlah		-	3	27	3	
Jumlah						46

Tabel 1.2 Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Struktural	-	1	-	21	1	23
2.	Fungsional	-	-	-	-	-	-
3.	Staf	-	4	2	3	1	10
4.	Arsiparis	-	-	-	-	-	-
5.	THD	-	-	-	-	-	
6.	THL	-	3	2	8	-	13
Jumlah		-	9	4	32	2	46

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang: Data Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, dan Sistematika Penyajian
- Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- Bab 3 Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang: Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja; serta Akuntabilitas Keuangan.
- Bab 4 Penutup menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada DP3APPKB Kota Batam, yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama DP3APPKB beserta seluruh karyawan dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan DP3APPKB Kota Batam yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam upaya optimalisasi kinerja Pemerintahan di Kota Batam.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 , **Visi Kota Batam** adalah ***Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.***

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Visi :

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

“Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas P3APPKB Kota Batam Batam sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
2. Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key performance factors*) yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Tujuan

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance indicator*) tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 1 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah
- Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak
- Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana
- Meningkatkan Keberdayaan keluarga.

2. Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional, Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun, guna mencapai tujuan jangka menengah yang telah dirumuskan untuk lima tahun ke depan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara periodik baik secara tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Adapun sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1 : *Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)*. Peningkatan komitmen kepala daerah dalam pengarusutamaan gender; mengoptimalkan peran kelembagaan Pokja PUG dan focal point perangkat daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender; mengoptimalkan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
2. Misi 2 : *Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan, Meningkatnya capaian Kota Layak Anak.
3. Misi 3 : *Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)*. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE, optimalisasi peranan kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Ber-KB, Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga, UPPKS dan PIK-R.

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1) Kebijakan

Kebijakan dalam hal ini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan ataupun tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan Walikota Batam dan berbagai kebijakan internal lainnya yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG; Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang
- Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang
- Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kota layak anak
- Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
- Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2) Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program kerja operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah sebagai berikut :

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- Program peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak;
- Program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

D. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

1) Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2020. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

b) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS), diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

d) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2) Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.53%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59.50 %
		Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan	100 %
2.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)	73.50 %

BAB III
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban Kinerja Instansi. Tolak ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yaitu:

1. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2020)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.53%	94.42%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59.50 %	58.40%
		Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan	100 %	100 %
2.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)	73.50 %	84.02%

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga diwujudkan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak. Indikator dari perjanjian kinerja Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Namun dari segi pelaksanaannya sangat terdampak akibat penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) yang secara global telah mempengaruhi segala sektor kehidupan dan bidang ekonomi bangsa Indonesia khususnya kota Batam. Kebijakan pelaksanaan program pembangunan pada masa pandemi ini berpedoman kepada peraturan yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Untuk Penanggulangan Covid-19. Secara persentase anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bergeser akibat penyebaran covid-19 ini sebesar 23.02% dengan refocussing anggaran dalam 2 (dua) kegiatan yaitu : Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan dan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Pelembagaan PUG.

Dan secara umum pelaksanaan kegiatan yang berbasis pertemuan kepada masyarakat baru dapat dilaksanakan pada akhir triwulan II (kedua) akibat kondisi pandemi covid-19 dengan menerapkan sejumlah aturan dan protocol covid-19. Data IPG **94.42** dan IDG **58.40** yang disajikan pada laporan ini adalah data banding dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, dengan tujuan untuk dapat mengetahui tingkat perbandingan tiap tahunnya namun secara real angka IPG dan IDG Kota Batam pada tahun 2020 menurut asumsi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dapat terkoreksi pada angka IPG 93.54 dan IDG 52.12 karena kondisi pandemic yang dialami saat ini. Kendatipun demikian tujuan dan sasaran yang ingin di capai melalui indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam masih dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup dimaksud berkaitan dengan nilai kontribusi, peran aktif serta upaya perempuan dalam mendukung terlaksananya

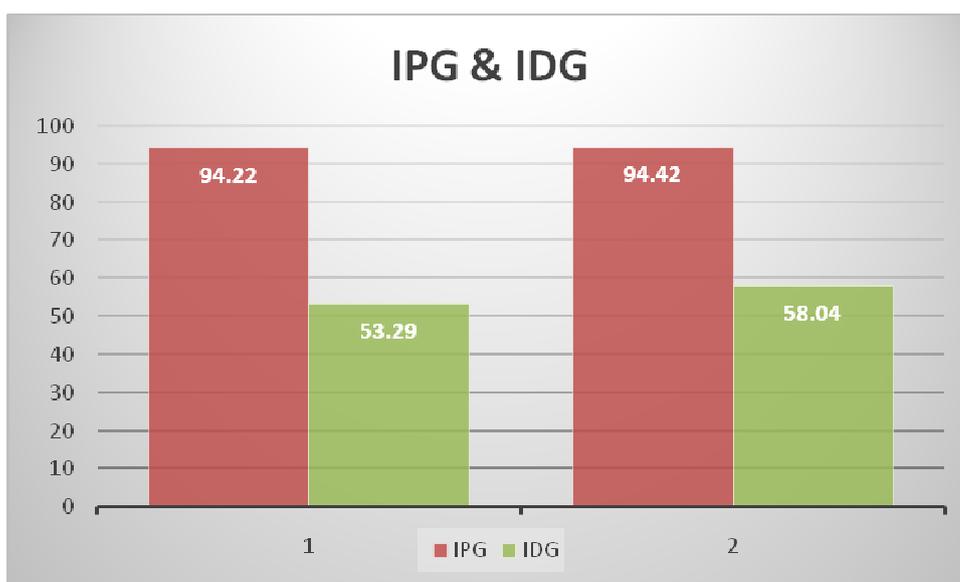
pembangunan kota Batam dari berbagai sektor kehidupan. Kenyataannya masih banyak perempuan yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup yang konservatif sehingga belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Batam. Disamping itu, perempuan saat ini masih merasakan adanya diskriminasi sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Batam melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali potensi diri perempuan kota Batam untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan.

Pada tahun 2020, 960 orang perempuan turut aktif dalam Peringatan HKK PKK Kota Batam yang disejalankan dengan Kegiatan Halal Bi Halal, 6000 orang hadir dalam Pembinaan Akhlak Mulia, 250 orang aktif dalam kegiatan sarasehan Organisasi Perempuan yang disejalankan peringatan Hari Ibu. Dan dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM perempuan kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan kota Batam tahun 2020 diadakan pelatihan tata rias bagi 750 orang ibu rumah tangga se-kota Batam yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan kaum perempuan.

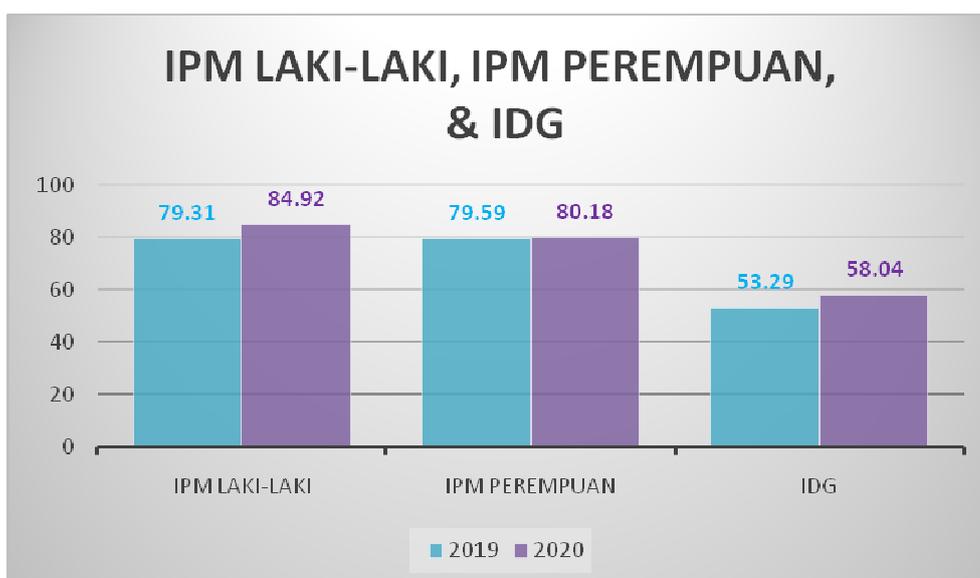
Pada tahun 2020 walaupun Kegiatan Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Kelembagaan PUG tidak dapat terlaksana, Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam tetap melakukan upaya optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program pengarusutamaan Gender melalui koordinasi dan komunikasi online yang melibatkan perencana dan staf OPD se-kota Batam untuk tetap memberikan tatanan dalam pengalokasian anggaran yang berbasis gender. Sehingga diharapkan program kegiatan pembangunan kota Batam tetap berporos kepada GAB/GBS sehingga terwujud tata kelola pembangunan yang berporos gender. Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak yang telah disusun melalui pembangunan jaringan SIPUGA (Sistem Aplikasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) yang menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender kota Batam. Pada tahun 2020 tetap dilakukan pengembangan Sistem Aplikasi SIPUGA yang mengacu kepada system GAB/GBS yang diharapkan dapat menjadi basis data pelaksanaan gender di Kota Batam. Dan ketersediaan data ini diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat OPD Pemerintah Kota Batam dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen masyarakat.

Melalui program inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Perempuan, dan Indeks Pemberdayaan Gender di kota Batam yang berkorelasi dengan pencapaian IPM Kota Batam secara umumnya. Keberhasilan dalam pencapaian ini tentunya melibatkan semua sektor dan unsur-unsur lainnya yang prior dalam usaha pembangunan kota Batam baik dalam level pemerintahan maupun komponen swasta lainnya. Secara umum, dalam mewujudkan kualitas hidup dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam telah dilakukan berbagai langkah progresif yang memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam melangsungkan kehidupan berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial.

Menjelaskan kondisi ini sebagai berikut capaian IPG dan IDG Kota Batam Tahun 2020 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya :



Data Sumber : BPS Kota Batam



Melalui grafik di atas dapat dijelaskan pencapaian IPG Kota Batam sebesar 94.42 yang meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 94.22. Pada tahun 2020 IPM Laki-laki sebesar 84.92 dan IPM Perempuan sebesar 80.18. Sedangkan pada tahun 2019 IPM Laki-laki 84.47 dan IPM perempuan sebesar 79.31. Ada peningkatan IPM perempuan sebesar 0.87 dari tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya akselerasi percepatan pembangunan perempuan yang mengikuti percepatan capaian pembangunan laki-laki.

Sebagai berikut komponen IPG Kota Batam Tahun 2020 :

KOTA	UHH		EYS		MYS		PENGELUARAN PERKAPITA		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
BATAM	71.34	75.13	13.04	13.17	11.32	10.96	26.536	17.398	84.92	80.18	94.42

Dari masing-masing komponen, perempuan masih lebih lambat peningkatannya di rata-rata lama sekolah sebesar 10.96 dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang hanya sebesar 17.398 dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 26.536. Perempuan unggul di umur harapan hidup sebesar 75.13 dibanding laki-laki sebesar 71.34 dan harapan lama sekolah unggul hanya sebesar 0.13 di angka 13.17 dibanding laki-laki 13.04. Namun secara umum, IPG Kota Batam tercapai diatas IPG Nasional yang sebesar 90.99.

IDG Kota Batam pada tahun 2020 sebesar 58.40 capaian ini terlihat meningkat signifikan sebesar 5.11 point dari tahun sebelumnya IDG sebesar 53.29. Sebagai berikut komponen IDG Kota Batam tahun 2020 :

TAHUN	Keterlibatan dalam Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
2019	6.00	34.70	28.89
2020	8.00	41.40	29.31

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan IDG Kota Batam yang menunjukkan peningkatan peran serta kaum perempuan dalam sector-sektor pembangunan dan bidang usaha. Telihat melalui tabel di atas di 3 komponen IDG mengalami peningkatan dan khususnya pada perempuan sebagai tenaga profesional meningkat sebesar 6.7 point di angka 41.40. Kondisi ini menunjukkan ada akselerasi dan kontribusi positif kaum perempuan dalam progress usaha pembangunan kota Batam. Seterusnya diharapkan indikator ini sebagai sinyalmen yang positif dan berkelanjutan sehingga kaum perempuan tidak lagi menjadi kaum yang tebelakang tetapi turut andil dalam bagian yang besar dalam upaya pembangunan kota Batam secara umumnya. Melalui pencapaian ini perempuan harus lebih aktif lagi menggali kapasitas dan potensi diri dengan mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk mengimbangi akselerasi laki-laki di dalam lapangan pekerjaan. Dalam hal keterwakilan di parlemen perempuan pun masih menunjukkan capaian yang belum maksimal. Demikian halnya dengan sumbangan pendapatan perempuan masih terlihat adanya diskriminasi dimana sumbangan pendapatan perempuan masih di bawah angka rata-rata sumbangan pendapatan laki-laki.

Melalui pencapaian ini, secara umum melalui program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak sasaran strategis yang ingin dicapai telah terlaksana dengan baik dengan IPG sebesar **94.42** dan IDG sebesar **58.40**.

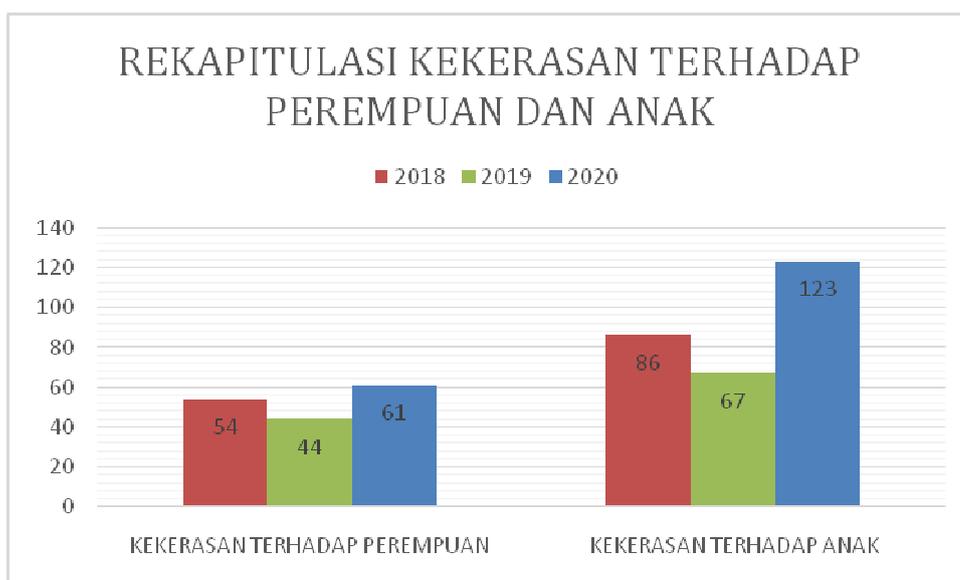
Batam sebagai pusat industri dan wisata tampaknya menjadi daya tarik yang memikat setiap orang untuk mencoba hidup di kota Batam hal ini tentunya memicu tingginya mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Batam yang secara umum menciptakan masalah social yang kompleks dewasa ini. Banyaknya pencari pekerjaan perempuan yang datang yang tidak diimbangi dengan skill yang memadai maupun ketersediaan lapangan pekerjaan

menciptakan tingginya angka pengangguran di kota Batam. Secara psikologis hal ini mengakibatkan tingkat stress kehidupan yang tinggi, karena banyaknya pasangan muda yang menikah, sulitnya memperoleh memperoleh sumber penghidupan akibat keterbatasan lapangan pekerjaan sementara harus membesarkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Akibatnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan.

Di sisi lain Batam sebagai border line dan tujuan transit ke luar negeri mengakibatkan seringnya terjadi tindak perdagangan orang ataupun trafiking, yang pada umumnya dialami oleh perempuan. Seringkali korban dijanjikan pekerjaan ke luar negeri dengan gaji yang tinggi melalui akses keluar kota Batam. Namun ternyata hanyalah sebuah kedok yang berujung pada perdagangan orang dan dipekerjakan sebagai penjaja seks komersil. Fenomena ini bukan lah sesuatu yang langka di kota Batam.

Dalam hal inipun Dinas Pemberdayaan Perempuan telah berupaya semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan jejaring Tindak perdagangan orang maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kota Batam, diantaranya adalah :Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau(KKP-PMP) Kepri, Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, Yayasan Lintas Nusa, LIBAK, Gembala Baik dan stakeholder terkait lainnya baik vertical maupun horizontal.

Sebagai berikut gambaran Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kota Batam dalam kurun tiga tahun terakhir :



Melalui grafik di atas di gambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Batam dalam kurun 3 tahun terakhir angkanya fluktuatif namun bergerak naik pada tahun 2020. Dari tahun 2018 dan 2019 antara jumlah kekerasan perempuan dan anak frekuensinya relative seimbang. Memang dibanding kekerasan terhadap perempuan, tingkat kekerasan terhadap anak angkanya masih lebih tinggi. Tetapi pada tahun 2020 angka ini terlihat meningkat baik kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

Pada tahun 2020 ada peningkatan 38.63% angka kekerasan terhadap perempuan di bandingkan tahun 2019. Demikian halnya kekerasan terhadap anak meningkat sebesar 83%. dari tahun sebelumnya. Data ini sesuai dengan yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Dapat dijelaskan bahwa psikologis hidup keluarga yang rapuh dan tidak kuat dalam fondasi nilai moral dan sosial memicu kecenderungan perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Sepanjang tahun 2020 sebanyak 184 orang perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mencakupi 61 orang kekerasan terhadap perempuan per total perempuan 551.172 dan 123 orang kekerasan terhadap anak per total anak 106.977. Pada tahun ini terlihat angka kekerasan melonjak cukup tinggi dibandingkan angka pada tahun lalu hanya sebanyak 113 orang meliputi 44 orang perempuan dan 67 orang anak. Berturut-turut dari kondisi 3 tahun terakhir, tahun 2020 adalah angka yang paling tinggi. Hal ini di latar belakang oleh semakin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat kota Batam yang dilatarbelakangi tuntutan hidup secara ekonomi dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di tahun 2020 ini yang sangat terbatas jumlahnya. Anak mengalami kerentanan yang lebih tinggi mengalami kekerasan baik kekerasan ekonomi maupun psikologis termasuk seksual. Hal ini tentunya terdampak secara psikologis oleh kondisi pandemic covid-19 yang kita alami pada tahun 2020 ini yang secara umum merombak berbagai tatanan dan sector kehidupan baik dalam dunia usaha, pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat.

Pada umumnya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual yang meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan. Hal inilah yang menjadi salah satu program prioritas Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam untuk menggiatkan Perda Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak, maka dengan aktif mensosialisasikan perda tersebut diharapkan perempuan semakin cerdas dalam membentengi diri dari berbagai tindakan kekerasan demikian halnya anak-anak mendapat perlindungan dan hak hidup sebagaimana mestinya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, dari tahun 2012 s.d. tahun 2019 telah terbentuk 15 Kelurahan Layak Anak, 2 kecamatan Layak Anak (Kecamatan Sagulung dan Lubuk Baja), pembentukan Forum Anak Kecamatan kota Batam di 3 kecamatan (Batu Aji, Sekupang, Sagulung) dan aktif melaksanakan penyuluhan perlindungan anak di kota Batam yang pada tahun 2019 dilaksanakan di 4 kecamatan (Batu Aji, Sagulung, Sei Beduk, Lubuk Baja). Melalui wadah ini diupayakan juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti tempat bermain, pojok baca, dan penyediaan klinik laktase di tempat-tempat umum (Mall, bandara, perkantoran, dll). Demikian halnya keberadaan KPPAD Kota Batam yang turut mengambil bagian besar dalam upaya pemenuhan dan penyediaan akses layanan terhadap tumbuh kembang anak secara umum di kota Batam.

Dengan demikian pada tahun 2020 telah dilakukan upaya yang sangat baik dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak baik dalam penanganan terhadap korban maupun pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan anak diterima total 184 orang melalui pengaduan dan kunjungan baik melalui Dinas P3A P2 & KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Adapun mekanisme pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2 & KB Kota Batam maupun P2TP2A Kota Batam tersebut melalui ;

1. Pengaduan / Identifikasi
2. Investigasi
3. Konseling dan Pendampingan korban; Psikologi dan Hukum
4. Penanganan di shelter (Rumah Singgah)
5. Reintegrasi Sosial

Maka pada tahun 2020, target indikator Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan telah tercapai 100 %. Dalam hal ketercapaian partisipasi aktif perempuan dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak ini, maka kualitas ketahanan keluarga di Kota Batam meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Jumlah Penduduk kota Batam dari tahun ke tahun umumnya mengalami peningkatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya daya tarik dalam lapangan pekerjaan di Kota Batam yang memberikan stimulus bagi kaum pencari kerja untuk masuk ke Kota Batam. Umumnya penduduk yang masuk ke kota Batam adalah usia produktif antara 18 s.d. 40 tahun. Pada tahun 2020 populasi kota Batam berjumlah 1.329.773 dan didominasi oleh usia produktif yang beresiko tinggi terhadap tingginya angka kelahiran di kota Batam. Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR).

CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Batam Tahun 2020 sebanyak 233.626 pasang. Untuk peserta KB aktif Kota Batam. pada tahun 2020 sebanyak 196.295 peserta. Rumus dari CPR adalah Peserta KB Aktif (PA) dibagi Pasangan Usia Subur (PUS) x 100. Pada tahun 2020 capaian dari indikator ini sebesar 84.02 % dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 73.5 %. Memang terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan dibanding pencapaian tahun 2019 sebesar 80.23 %.

Pencapaian CPR(contraceptive prevalence rate) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Pada tahun 2020 sekalipun dalam masa pandemic covid-19 tetap dilakukan upaya dan layanan KB secara maksimal baik di klinik layanan pemerintah maupun swasta yang tentunya pelayanan KB pada masa pandemic ini menerapkan sejumlah aturan protocol kesehatan yang sangat ketat sesuai maklumat pencegahan penyebaran covid-19 di kota Batam. Penyuluhan KB diperkuat dengan basis layanan informasi online yang terintegrasi dengan WEBEX BKKBN Provinsi Kepulauan Riau sehingga informasi mengenai program pembangunan kependudukan dan KB tetap dapat tersampaikan kepada masyarakat kota Batam.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Remaja sedini mungkin diberikan pemahaman yang matang dalam perencanaan perkawinan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting dalam melahirkan tunas generasi yang unggul dalam hal ini di lakukan melalui penyerahan Genre KIT kepada Petugas Lapangan KB kota Batam sebagai basis dan panduan informasi tumbuh kembang remaja yang difasilitasi melalui Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Kota Batam.

Pada tahun 2020 telah didistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 84 klinik KB baik pemerintah maupun swasta. Demikian halnya penyediaan sarana dan prasaran layanan KB yang terlaksana 100 % di tahun 2020 melalui pengadaan Obgyn bed, Implant dan IUD removal Kit Masing-masing sebanyak 80 set yang disalurkan ke klinik KB pemerintah maupun swasta. Peningkatan sarana parasarana Balai Penyuluhan KB di 12 kecamatan dilaksanakan

melalui penyaluran mebelair, layar proyektor, Personal kompputer, Laptop, Printer, Modem Infocus yang turut meningkatkan kualitas layanan KB di kota Batam.

Demikian halnya penggerakan kampung KB dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan masyarakat tentang konsep dan tatanan nilai pelaksanaan program KB di kota Batam. Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana(PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Pada tahun 2020, juga dilaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) melalui Bakti Sosial Pelayanan KB gratis di 3 (tiga) kecamatan dan pelayanan KB serentak dalam peringatan hari Kontrasepsi Nasional yang berkontribusi besar dalam pencapaian persentase pemakai kontrasepsi (CPR) sebesar 84.02. Demikian halnya metode layanan KB di masa pandemic covid-19 dilakukan dengan sistem Bidan Rujukan yang aktif melayani masyarakat untuk melaksanakan program KB di 12 kecamatan kota Batam.

Dalam hal meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan program KB ini, maka ketercapaian Contraceptive Prevalence rate di kota Batam sebesar 84.02% dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020. Dengan kata lain capaian indikator ini terintegrasi dari keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan peran serta PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD Kota Batam.

Sebagai berikut Pencapaian Peserta KB aktif pada tahun 2020 :

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN SE KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PER MIX KONTRASEPSI							JUMLAH PA	% PA PUS
			IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIK	PIL		
1	BELAKANG PADANG	5379	96	39	9	41	122	1716	518	2541	47.24
2	BATU AMPAR	10932	295	179	118	1148	712	4625	2516	9593	87.75
3	SEKUPANG	34840	1188	1013	133	1939	1731	12408	7837	26249	75.34
4	NONGSA	10153	299	101	26	437	220	3034	1589	5706	56.20
5	BULANG	2241	90	75	0	90	161	856	676	1948	86.93
6	LUBUK BAJA	22778	3989	1122	83	1919	1271	7675	5296	21355	93.75
7	SEI BEDUK	22019	1159	268	118	2593	1548	2841	5294	13821	62.77
8	GALANG	2803	38	17	0	145	445	916	812	2373	84.66
9	BENGGONG	20430	3032	446	86	1175	927	6598	5850	18114	88.66
10	BATAM KOTA	30841	3033	638	114	1673	4691	10642	8293	29084	94.30
11	SAGULUNG	43900	10768	911	163	1594	1805	13397	11435	40073	91.28
12	BATU AJI	27310	2027	1361	172	1326	4390	10519	5643	25438	93.15
	KOTA BATAM	233626	26014	6170	1022	14080	18023	75227	55759	196295	84.02
	IKP/PPM										
	% PA PPM/PERMIX										
	% PA PER MIX / JML PA										

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	PROGRAM RPJMD	KEGIATAN	2020		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	4	7	8	9
I	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	802.908.045,-	733.061.337,-	91.30
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.074.500,-	37.074.500,-	99.63
III	Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	449.545.000,-	242.245.000,-	53.89
		Pembinaan Organisasi Perempuan	119.085.000,-	78.305.000,-	65.76
IV	Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	190.884.400,-	176.034.400,-	92.22
		Pembentukan dan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam	261.000.000,-	261.000.000,-	100.0
V	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)	1.176.500.000,-	1.081.520.160,-	91.93
		Penggerakan Kampung KB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/ DAK Non Fisik)	977.196.000,-	291.967.500,-	29.88
		Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (Bantuan Operasional/ DAK Non Fisik)	1.305.828.000,-	667.426.202,-	51.11
		Pembinaan Program KKBPK, Distribusi Alkon dan Manajemen BOKB (Bantuan Operasional	747.600.000,-	538.445.200,-	72.02

NO	PROGRAM RPJMD	KEGIATAN	2020		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	4	7	8	9
		Keluarga Berencana/ DAK Non Fisik)			
TOTAL			6.124.184.570,-	4.163.504.299,-	67.98

Catatan : Laporan Realisasi s/d 30 Desember 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana dengan baik, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara fisik maupun dari sisi keuangannya sehingga secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan memenuhi Rencana Capaian Kinerja (target) sesuai yang tertuang dalam 2 rencana strategis yang ingin dicapai. Kendatipun sepanjang tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan terdampak oleh kondisi pandemic covid-19 sehingga ditemui sejumlah kendala dan kekurangan akan tetapi hal tersebut masih bersifat wajar dan secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang dijadwalkan.

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban terhadap Penetapan Kinerja”

Dari seluruh Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis dalam program-program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil merealisasikannya. Dan diharapkan capaian ini akan terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang dan tetap proaktif merespons segala tantangan yang ada dalam upaya mewujudkan Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera seperti yang tertuang dalam visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Sebagai akhir dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini, indikator ukuran dan pembuatannya dilaksanakan dengan tetap mengacu dan berpedoman pada aturan baku pembuatan LKjIP yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Batam.

